

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data dan Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor perbankan yang telah tercatat di BEI yang dipublikasikan pada periode 2014 -2016. Sumber data dapat diperoleh melalui media perantara dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id.

4.1.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk (AGRO)

Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (Bank BRI AGRO) (dahulu Bank Agroniaga Tbk) (AGRO) didirikan tertanggal 27 September 1989 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Kantor pusat Bank BRI AGRO berlokasi di Gedung BRI AGRO, Jl. Warung Jati Barat No.139 (d/h Jl. Mampang Prapatan Raya No.139 A) Jaksel 12740. Bank BRI AGRO memiliki 1 kantor pusat non operasional, 16 kantor cabang dan 19 kantor cabang pembantu. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, yaitu: Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) / BBRI (87,23%) dan Dana Pensiun Perkebunan (6,66%). Bank AGRO diakuisisi oleh Bank BRI pada tahun 2011 dan kemudian ditahun 2012 nama Bank Agroniaga Tbk diganti menjadi Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (Bank BRI AGRO). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan AGRO adalah menjalankan kegiatan umum di bidang perbankan, dengan fokus utama di sektor agribisnis. Bank BRI AGRO memperoleh izin sebagai bank umum pada tanggal 11 Desember 1989 dan izin sebagai Bank Devisa 08 Mei 2006. Pada tanggal 30 Juni 2003, AGRO memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham AGRO (IPO) kepada masyarakat melalui pasar modal. Kemudian pada 8 Agustus 2003 Perusahaan mencatatkan saham perdananya sebanyak 1.514.043.000 lembar saham di Bursa Efek Surabaya (BES) (sekarang Bursa Efek Indonesia / BEI).

b. Bank Bukopin Tbk (BBKP)

Bank Bukopin Tbk (BBKP) didirikan di Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin) dan mulai melakukan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971. Kantor pusat BBKP beralamat di Gedung Bank Bukopin, Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770 – Indonesia. Saat ini, Bank Bukopin memiliki 41 kantor cabang, 129 kantor cabang pembantu, 75 kantor fungsional, 152 kantor kas, dan 35 payment points. Dalam perkembangannya, Bank Bukopin telah melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Kemudian pada 02 Januari 1990 dalam Rapat Anggota Bank Umum Korporasi Indonesia memutuskan mengganti nama Bank menjadi Bank Bukopin. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Bukopin Tbk, antara lain: PT Bosowa Corporindo (pengendali) (30%), Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO) (18,09%) dan Negara Republik Indonesia (11,43%). Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, usaha BBKP mencakup segala kegiatan bank umum dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2006, BBKP memperoleh pernyataan efektif BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBKP (IPO) kepada masyarakat sejumlah 843.765.500 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dan harga penawaran sebesar Rp350,- per saham. Saham-saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 Juli 2006.

c. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI) (BBNI) didirikan 05 Juli 1946 di Indonesia sebagai Bank Sentral. Pada tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Kantor pusat Bank BNI berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 – Indonesia.

Bank BNI memiliki 196 kantor cabang, 944 cabang pembantu domestik serta 829 outlet lainnya. Selain itu, jaringan Bank BNI juga meliputi 5 kantor cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London dan Korea Selatan serta 1

kantor perwakilan di New York. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah Negara Republik Indonesia, dengan persentase kepemilikan sebesar 60,00%. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan (termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah melalui anak usaha). Selain itu, Bank BNI juga menjalankan kegiatan usaha diluar perbankan melalui anak usahanya, antara lain: asuransi jiwa, pembiayaan, sekuritas dan jasa keuangan. Pada tanggal 28 Oktober 1996, BBNi memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBNi (IPO) Seri B kepada masyarakat sebanyak 1.085.032.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp850,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 25 November 1996.

d. Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BBNP)

Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Bank BNP) (BBNP) didirikan 18 Januari 1972 dengan nama PT Bank Pasar Karya Parahyangan. Kantor pusat Bank BNP beralamat di Jalan. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung. Saat ini, Bank BNP memiliki 15 kantor cabang, 47 cabang pembantu dan kantor kas, 1 mobil kas keliling, 1 kantor fungsional non-operasional, 4 kantor fungsional operasional. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Nusantara Parahyangan Tbk, antara lain: Acom Co., Ltd (pengendali) (66,15%), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (pengendali) (9,35%) dan PT Hermawan Sentral Investama (6,46%). Bank BNP mulai beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 3 Juli 1989. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 5 Agustus 1994, Bank BNP ditingkatkan statusnya menjadi Bank Devisa. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank BNP adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Pada tanggal 14 Desember 2000, BBNP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBNP (IPO) kepada masyarakat sebanyak 50.000.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp525,- per saham, dan disertai 20.000.000 Waran seri I dan

periode pelaksanaan mulai dari 10 Juli 2001 sampai dengan 09 Januari 2004 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp600,- per saham. Saham dan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 Januari 2001.

e. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) (BBTN) didirikan 09 Februari 1950 dengan nama “Bank Tabungan Pos”. Kantor pusat Bank BTN berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130 – Indonesia. Bank BTN memiliki 88 kantor cabang (termasuk 23 kantor cabang syariah), 279 cabang pembantu (termasuk 36 kantor cabang pembantu syariah), 483 kantor kas (termasuk 6 kantor kas syariah), dan 2.951 SOPP (System on-line Payment Point/Kantor Pos on-line). Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah Negara Republik Indonesia, dengan persentase kepemilikan sebesar 60,03%. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank BTN adalah menjalankan kegiatan umum perbankan, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah. Bank BTN mulai melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sejak 14 Februari 2005. Pada tanggal 08 Desember 2009, BBTN memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBTN (IPO) Seri B kepada masyarakat sebanyak 2.360.057.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp800,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 17 Desember 2009. Pada Bank BTN terdapat 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna yang dipegang Pemerintah Negara Republik Indonesia. Pemegang saham seri A memperoleh hak khusus untuk mengajukan calon Dewan Komisaris dan Direksi sebagai tambahan atas hak yang diperoleh pemegang saham seri B.

f. Bank Jabar Banten Tbk (BJBR)

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank Jabar Banten / Bank BJB) (BJBR) didirikan pada tanggal 08 April 1999. Bank BJB sebelumnya merupakan sebuah perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dinasionalisasi

pada tahun 1960 yaitu N.V. Denis (De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding) dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 20 Mei 1961. Kantor pusat Bank BJB berlokasi di Menara Bank bjb, Jl. Naripan No. 12-14, Bandung 40111 – Indonesia. Saat ini, Bank BJB memiliki 63 kantor cabang, 311 kantor cabang pembantu, 337 kantor kas, 142 payment point. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank BJB, yaitu: Pemda Propinsi Jawa Barat (pengendali) (38,262%), Pemda Kabupaten Bandung (7,022%) dan Pemda Propinsi Banten (5,369%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BJBR adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Selain kegiatan perbankan, BJBR juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BJBR, atau BJBR sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR. Pada tanggal 29 Juni 2010, BJBR memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana atas 2.424.072.500 Saham Seri B dengan nilai nominal Rp250,- per saham dan harga penawaran Rp600,- per saham. BJBR telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 08 Juli 2010.

g. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM)

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) (BJTM) didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1961. Kantor pusat Bank Jatim berlokasi di Jl. Basuki Rachmat No.98-104 Surabaya 60271 Jawa Timur. Saat ini, Bank Jatim memiliki 41 kantor cabang, 158 kantor cabang pembantu, 191 kantor kas, 174 payment point dan 79 kas mobil serta 1 unit usaha Syariah yang mempunyai 7 cabang Syariah, 8 kantor cabang pembantu Syariah, 191 kantor layanan Syariah, 6 payment point Syariah dan 6 kas mobil Syariah. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, yaitu Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Timur (pengendali) (51,36%) dan 38 Pemda Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (28,48%). Induk usaha

terakhir Bank Jatim adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BJTM adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 29 Juni 2012, BJTM memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BJTM (IPO) kepada masyarakat sebanyak 2.983.537.000 Saham Seri B dengan nilai nominal Rp250,- per saham dan harga penawaran Rp430,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 12 Juli 2012.

h. Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS)

Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS) didirikan tanggal 06 Nopember 1989 dan memulai kegiatan komersial pada tahun 1990. Kantor pusat Bank Maspion berlokasi di Jalan Basuki Rachmat No. 50 – 54, Surabaya 60262 – Indonesia. Saat ini, Bank Maspion memiliki 10 kantor cabang, 30 kantor cabang pembantu, 9 kantor kas, 1 kantor fungsional UMKM dan 2 kas mobil. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Maspion Indonesia Tbk, antara lain: PT Alim Investindo (67,69%), PT Maspion (14,34%) dan PT Guna Investindo (6,77%). Induk usaha dan induk usaha terakhir Bank Maspion adalah PT Alim Investindo, yang didirikan di Indonesia. Adapun pemegang saham PT Alim Investindo, antara lain: Alim Markus (28%), Alim Mulia Sastra (22,40%), Alim Prakasa (22,40%), Alim Puspita (11,20%) dan PT Husin Investama (16,00%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank Maspion adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bank Maspion memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum tanggal 30 Juli 1990 dan memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa tanggal 28 Juli 1995. Pada tanggal 27 Juni 2013, BMAS memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BMAS (IPO) kepada masyarakat sebanyak 770.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga

penawaran Rp320,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 Juli 2013.

i. Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu Bank Niaga Tbk) (BNGA)

Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu Bank Niaga Tbk) (BNGA) didirikan 04 Nopember 1955. Kantor pusat Bank CIMB Niaga berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta. Saat ini Bank CIMB Niaga memiliki 156 kantor cabang, 586 kantor cabang pembantu, 34 kantor pembayaran, 30 Unit cabang Syariah dan 616 kantor layanan Syariah. Sejak berdirinya, BNGA telah mengalami 4 (empat) kali penggabungan usaha (merger), yaitu: 1) Tanggal 22 Oktober 1973 dengan PT Bank Agung; 2) Tanggal 30 November 1978 dengan PT Bank Tabungan Bandung; 3) Tanggal 17 Oktober 1983 dengan PT Bank Amerta; dan 4) Tanggal 1 November 2008 dengan Bank Lippo Tbk. Pemegang saham mayoritas / pengendali BNGA adalah CIMB Group Sdn Bhd (Malaysia), dengan kepemilikan 96,92%. CIMB Group Sdn Bhd dimiliki seluruhnya oleh CIMB Group Holdings Berhad. Pemegang saham mayoritas CIMB Group Holdings Berhad adalah Khazanah Nasional Berhad (29,90%), sedangkan Khazanah Nasional Berhad adalah entitas yang dimiliki oleh Pemerintah Malaysia. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank CIMB Niaga adalah melakukan usaha di bidang perbankan, dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Bank CIMB Niaga mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 27 September 2004. Pada tanggal 02 Oktober 1989, BNGA memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BNGA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 5.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp12.500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 29 Nopember 1989.

j. Bank Permata Tbk (dahulu Bank Bali Tbk) (BNLI)

Bank Permata Tbk (dahulu Bank Bali Tbk) (BNLI) didirikan 17 Desember 1954 dengan nama "Bank Persatuan Dagang Indonesia" dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Januari 1955. Kantor pusat Bank Permata berlokasi di

Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Indonesia. Bank Permata memiliki 56 kantor cabang (termasuk kantor pusat), 253 kantor cabang pembantu, 22 kantor kas, 6 kantor pembayaran, 22 mobil kas keliling, dan 312 kantor layanan Syariah. Pada tanggal 30 September 2012, Bank Bali Tbk melakukan peleburan usaha dengan 4 Bank Dalam Penyehatan, yang terdiri dari Bank Universal Tbk (Universal), PT Bank Prima Express (Primex), PT Bank Artamedia (Artamedia) dan PT Bank Patriot (Patriot). Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2002, nama Bank Bali Tbk diganti menjadi Bank Permata Tbk. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Permata, yaitu: Astra International Tbk (ASII) (pengendali) (44,56%) dan Standard Chartered Bank London (pengendali) (44,56%) (Standard Chartered Bank dimiliki oleh Standard Chartered Holdings Limited, dan pemegang saham Standard Chartered Holdings Limited adalah Standard Chartered PLC). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BNLi adalah menjalankan kegiatan umum perbankan, termasuk menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah (sejak bulan Nopember 2004). Pada tanggal 02 Desember 1989, BNLi memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BNLi kepada masyarakat sebanyak 3.999.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp9.900,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Januari 1990.

k. Bank Sinarmas Tbk (BSIM)

Bank Sinarmas Tbk (BSIM) didirikan dengan nama PT Bank Shinta Indonesia tanggal 18 Agustus 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Februari 1990. Kantor pusat Bank Sinarmas beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara I, Lt 1 & 2, Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 dan memiliki 1 kantor cabang utama, 72 kantor cabang, 1 kantor cabang fungsional, 130 kantor cabang pembantu, 27 kantor cabang syariah, 141 kantor kas, dan 10 kantor kas syariah di Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Sinarmas Tbk adalah Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA), dengan persentase kepemilikan sebesar 52,98%. Sedangkan pemegang akhir dari Bank Sinarmas

adalah Indra Widjaja. BSIM memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 16 Februari 1990. Lalu tanggal 22 Maret 1995 BSIM memperoleh ijin usaha sebagai Bank Devisa dari Bank Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2009 Bank Sinarmas memperoleh izin usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dari Deputi Gubernur Bank Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BSIM adalah menjalankan usaha di bidang perbankan, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah. Pada tanggal 29 Nopember 2010, BSIM memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BSIM (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.600.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp150,- per saham disertai dengan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif sebanyak 1.920.000.000 dengan pelaksanaan sebesar Rp150,- per saham. Setiap pemegang saham Waran berhak membeli satu saham perusahaan selama masa pelaksanaan yaitu mulai tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan 11 Desember 2015. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 13 Desember 2010.

1. Bank Victoria International Tbk (BVIC)

Bank Victoria International Tbk (BVIC) didirikan 28 Oktober 1992 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 05 Oktober 1994. Kantor pusat Bank Victoria berlokasi di Panin Tower – Senayan City, Lantai 15, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270 – Indonesia. Saat ini, Bank Victoria memiliki 1 kantor cabang utama, 8 kantor cabang, 67 kantor cabang pembantu dan 27 kantor kas. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Victoria International Tbk, yaitu: Victoria Investama Tbk (pengendali) (VICO) (45,43%), Suzanna Tanojo (pengendali) (10,17%) dan DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (9,00%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BVIC adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Bank Victoria memperoleh ijin usaha sebagai bank umum dan sebagai pedagang valuta asing, masing-masing pada tanggal 10 Agustus 1994 dan 25 Mei 1997. Bank Victoria juga menjalankan usaha perbankan syariah melalui

anak usahanya, yaitu PT Bank Victoria Syariah (dahulu PT Bank Swaguna). Pada tanggal 04 Juni 1999, BVIC memperoleh pernyataan efektif dari Menteri Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BVIC (IPO) kepada masyarakat sebanyak 250.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp100,- per saham dan disertai 80.000.000 Waran seri I. Saham dan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 30 Juni 1999.

m. Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC)

Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC) didirikan tanggal 07 September 1973 dengan nama PT Inter-Pacific Financial Corporation dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1975 sebagai lembaga keuangan bukan bank. Kantor pusat Bank Artha Graha terletak Gedung Artha Graha, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 – Indonesia. Bank Artha Graha memiliki 39 kantor cabang, 64 kantor cabang pembantu, 14 kantor kas, 12 payment point, 1 mobile terminal. Pada tanggal 2 Februari 1993, PT Inter-Pacific Financial Corporation berubah nama menjadi PT Inter-Pacific Bank dan mendapatkan izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 24 Februari 1993. Kemudian tanggal 01 September 1998 PT Inter-Pacific Bank berubah nama menjadi Bank Inter-Pacific Tbk. Pada tanggal 11 Juli 2005, PT Bank Inter-Pacific melakukan penggabungan (merger) dengan PT Bank Artha Graha, dimana PT Bank Artha Graha menggabungkan diri kedalam PT Bank Inter-Pacific Tbk. Setelah itu, tanggal 16 Agustus 2005 Bank Inter-Pacific Tbk berganti nama menjadi Bank Artha Graha Internasional Tbk. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Artha Graha Internasional Tbk adalah PT Sumber Kencana Graha (16,70%), PT Cerana Arthaputra (10,10%), PT Arthamulia Sentosajaya (6,31%), PT Pirus Platinum Murni (6,31%), PT Puspita Bisnispuri (6,31%) dan PT Karya Nusantara Permai (5,44%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan INPC adalah melakukan usaha di bidang perbankan. INPC melakukan operasi komersial sebagai bank umum tanggal 24 Februari 1993. Pada tanggal 10 Juli 1990, INPC memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan

Penawaran Umum Perdana Saham INPC (IPO) kepada masyarakat sebanyak 5.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp9.750,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 23 Agustus 1990.

n. Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA)

Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) didirikan 07 September 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Maret 1990. Kantor pusat Bank Mayapada berlokasi di Mayapada Tower Lt. 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 28 – Jakarta. Bank Mayapada memiliki 36 kantor cabang, 77 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas dan 85 kantor fungsional. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Mayapada Internasional Tbk, yaitu: PT Mayapada Karunia (pengendali) (26,42%), JPMCB – Cathay Life Insurance Co LTD 2157804777 (40,00%), Galasco Investments Limited (10,00%), dan Unity Rise Limited (7,31%). Bank Mayapada memperoleh izin usaha sebagai bank komersial dari Kementerian Keuangan pada tanggal 16 Maret 1990 dan memperoleh izin kegiatan usaha sebagai bank devisa dari Bank Indonesia pada tanggal 3 Juni 1993. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank Mayapada adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya. Pada tanggal 07 Agustus 1997, MAYA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MAYA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 65.000.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp800,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 29 Agustus 1997.

o. Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin / Panin Bank) (PNBN)

Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin / Panin Bank) (PNBN) (Bank Panin) didirikan tanggal 14 Agustus 1971 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada 18 Agustus 1971. Kantor pusat Bank Pan Indonesia terletak di Gedung Panin Centre Jl. Jend. Sudirman Kav 1 (Senayan), Jakarta 10270 – Indonesias. Bank Panin memiliki 58 kantor cabang di Indonesia dan 1 kantor perwakilan di Singapura. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Pan

Indonesia Tbk, yaitu: Panin Financial Tbk (PNLF) (pengendali) (46,04%) dan Votraint No 1103 Pty Limited-922704000 (38,82%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank Panin adalah menjalankan usaha bank umum di dalam maupun di luar negeri. Bank Panin memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain: Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) (51,49%), Bank Panin Syariah Tbk (PNBS) (51,86%) dan Verena Multi Finance Tbk (VRNA) (57,54%). Pada tanggal 28 Oktober 1982, PNBN memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PNBN (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.637.500 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp3.475,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 29 Desember 1982.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Perhitungan Variabel

4.2.1.1 Variabel Dependen

ROE DUPONT (Y)

Tabel 4.1 Rata-rata Penentuan ROE DUPONT

No	Kode Bank	Tahun			Rata - Rata
		2014	2015	2016	
1	AGRO	10,0793	10,4054	71,0308	30,5052
2	BBKP	18,8300	14,0702	15,6112	16,1705
3	BBTN	22,7216	14,7588	19,8819	19,1208
4	BBNI	23,6520	22,1625	14,6179	20,1441
5	BJBR	38,9962	28,3472	24,8064	30,7166
6	BJTM	25,1561	23,6898	19,6150	22,8203
7	BMAS	74,9680	62,3525	69,4052	68,9086
8	BNGA	21,6885	10,7847	18,0103	16,8278
9	BNLI	14,5802	11,4255	17,1062	14,3706
10	BSIM	11,3106	72,9241	81,8293	55,3547
11	BBNP	13,9459	10,4951	66,2150	30,2186
12	INPC	10,3959	61,6586	17,6020	29,8855
13	BVIC	16,1344	68,1316	55,7697	46,6786
14	MAYA	11,5249	24,0701	39,0088	24,8679
15	PNBN	77,7105	11,4822	69,1669	52,7866

Sumber: Hasil Analisis Data

Berdasarkan tabel 4.1 Rata-rata Penentuan ROE DUPONT di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2016 dengan nilai terendah terjadi pada Bank Permata Tbk sebesar 14,3706 sedangkan nilai tertinggi terjadi pada Bank Maspion Indonesia Tbk sebesar 68,9086.

Ketika kinerja perusahaan semakin besar, maka pada tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut semakin besar dan posisi bank yang dilihat dari segi asset yang digunakan semakin baik. Ketika kinerja perusahaan semakin kecil, maka pada tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut semakin kecil dan posisi bank yang dilihat dari segi asset yang digunakan semakin kurang baik.

4.2.1.2 Variabel Independen

a. *Non Performing Loan (X1)*

Tabel 4.2 Rata-rata Penentuan NPL

No	Kode Bank	Tahun			Rata - Rata
		2014	2015	2016	
1	AGRO	2,2688	2,0232	1,9032	2,0650
2	BBKP	2,2488	2,7794	2,8322	2,6201
3	BBTN	4,0504	4,0120	3,4155	3,8260
4	BBNI	0,2268	0,0568	1,0613	0,4483
5	BJBR	2,8336	4,1539	2,9087	3,2987
6	BJTM	3,4424	3,3137	4,2897	3,6819
7	BMAS	0,6117	0,7091	0,5093	0,6100
8	BNGA	2,2279	3,9013	3,7401	3,2898
9	BNLI	0,9966	1,6991	2,7003	1,7986
10	BSIM	2,5037	3,0008	3,9502	3,1516
11	BBNP	0,4474	1,4128	3,9816	1,9473
12	INPC	1,9562	1,9247	2,3333	2,0714
13	BVIC	0,7032	3,5225	4,4765	2,9007
14	MAYA	1,0356	1,4626	2,5165	1,6716
15	PNBN	1,0185	2,6334	2,6334	2,0951

Sumber: Hasil Analisis Data

Berdasarkan tabel 4.2 Rata-rata Penentuan NPL di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2016 dengan nilai terendah terjadi pada Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk sebesar 0,4483 sedangkan nilai tertinggi terjadi pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar 3,8260.

Ketika Resiko Kredit semakin kecil maka semakin kecil juga risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Ketika resiko kredit tinggi maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit yang bermasalah semakin besar, sehingga bank mengalami kerugian dalam kegiatan operasionalnya yang berpengaruh terhadap menurunnya laba yang diperoleh bank.

4.2.1.3 Variabel Independen

b. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (X₂)

Tabel 4.3 Rata-rata Penentuan BOPO

No	Kode Bank	Tahun			Rata - Rata
		2014	2015	2016	
1	AGRO	85,8841	87,8521	88,6339	87,4567
2	BBKP	82,3783	89,2137	87,5554	86,3825
3	BBTN	82,1858	88,9651	84,8317	85,3276
4	BBNI	76,1601	81,1043	78,9750	78,7465
5	BJBR	79,4078	85,5953	83,3126	82,7719
6	BJTM	70,2840	69,6343	76,1185	72,0122
7	BMAS	88,7441	92,5876	89,5259	90,2859
8	BNGA	73,7921	87,8569	97,3774	86,3421
9	BNLI	84,9993	89,7961	98,9037	91,2330
10	BSIM	88,4994	94,5360	91,6703	91,5686
11	BBNP	86,3497	88,3701	90,9103	88,5433
12	INPC	85,2651	91,6277	96,6589	91,1839
13	BVIC	81,3499	93,2516	93,8918	89,4978
14	MAYA	78,5757	84,5033	82,6478	81,9089
15	PNBN	81,3120	82,5775	89,2875	84,3923

Sumber: Hasil Analisis Data

Berdasarkan tabel 4.3 Rata-rata Penentuan BOPO di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2016 dengan nilai terendah terjadi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar 72,0122 sedangkan nilai tertinggi terjadi pada Bank Sinar Mas Tbk sebesar 91,5686.

Ketika Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional semakin rendah maka semakin baik kinerja manajemen bank tersebut. Ketika Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional semakin tinggi maka semakin tidak efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan bank untuk memperoleh laba semakin kecil.

4.3 Hasil Uji Prasyarat Data

4.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Penjelasan kelompok melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku. Statistik deskriptif variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPL	45	,2268	4,7032	2,742862	1,2646536
BOPO	45	69,6343	98,9037	85,843544	6,6691833
ROE DUPONT	45	10,0793	81,8293	31,958421	23,8970273
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Hasil Analisis Data

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 sampel perusahaan. Data variabel *ROE DUPONT* memiliki nilai minimum 10,0793, Sedangkan nilai maksimum 81,8293. Rata-rata *ROE DUPONT* sebesar 31,9584 dan memiliki standar deviasi senilai 23,89702. Variabel ini mempunyai standar deviasi yang lebih besar dari pada nilai rata – rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *ROE DUPONT* pada penelitian ini mempunyai data yang variatif. Data variable *Non Performing Loan* (NPL) memiliki nilai minimum 0,2268 dan nilai maksimum 4,7032. Rata-rata nilai *Non Performing Loan* (NPL) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2,7428 dengan standar deviasi senilai 1,2646. Variabel ini mempunyai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa

variabel *Non Performing Loan* (NPL) pada penelitian ini mempunyai data yang tidak variatif atau homogen. Data variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Nilai minimum BOPO sebesar 69,6343. Sedangkan nilai maksimum BOPO sebesar 98,9037. Rata-rata Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 85,8435 dan memiliki standar deviasi senilai 6,6693. Variabel ini mempunyai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Operasional (BOPO) pada penelitian ini mempunyai data yang tidak variatif atau homogen

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tes *One-Sample Kolmogorov Smirnov*. Hasil pengujian untuk uji normalitas ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	22,22489106
	Absolute	,137
Most Extreme Differences	Positive	,137
	Negative	-,095
Kolmogorov-Smirnov Z		,920
Asymp. Sig. (2-tailed)		,365

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Analisis Data

Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,365. Nilai Asymp Sig. (2-tailed) tersebut kemudian dibandingkan dengan 0,05. Sehingga diperoleh bahwa nilai Asymp Sig. (2-tailed) 0,144 > 0,05. Hasil

tersebut dapat diartikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi yang normal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Data yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda dikatakan terbebas dari multikolinieritas dapat diketahui dengan nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *tolerance* yang lebih besar sama dengan 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari sama dengan 10 dapat dikatakan sebagai data yang tidak mengalami gejala multikolinieritas. Berikut adalah hasil pengujian multikolinieritas yang telah dilakukan:

Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	NPL	,994	1,006
	BOPO	,994	1,006

a. Dependent Variable: ROE DUPONT

Sumber: Hasil Analisis Data

Berdasarkan tabel 4.6, nilai *tolerance* yang diperoleh atas hasil uji multikolinieritas untuk semua variabel adalah $> 0,10$. Sedangkan nilai VIF untuk semua variabel adalah < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinieritas.

4.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Durbin Watson*. Berikut ini adalah hasil pengujian dengan menggunakan *Durbin Watson*:

Tabel 4.7 Uji Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,367 ^a	,135	,094	22,7479012	2,078

a. Predictors: (Constant), BOPO, NPL

b. Dependent Variable: ROE DUPONT

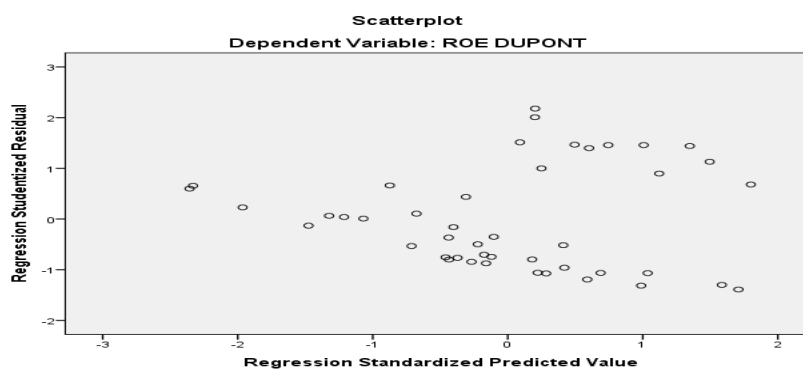
Sumber: Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 2,027. Data dikatakan terbebas dari autokorelasi adalah apabila nilai $dU < dw < 4-dU$. Hasil pengujian tersebut didapatkan nilai dU dengan $n=45$ dan $k=2$ adalah sebesar 1,601. Sehingga $1,801 < 2,028 < 4-1,601$. Artinya, data yang digunakan dalam penelitian ini masih belum terbebas atas autokorelasi.

4.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Analisis Data

Berdasarkan gambar Scatterplot pada gambar 4.8 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak namun tidak tersebar secara baik, karena titik-titik tersebut lebih banyak mengumpul dibawah titik nol pada sumbu Y. Tetapi titik-titik tersebut juga ada yang menyebar diatas angka nol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependennya. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi atau *Adjusted R²* yang telah dilakukan:

Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,367 ^a	,135	,094	22,7479012	2,078

a. Predictors: (Constant), BOPO, NPL

b. Dependent Variable: ROE DUPONT

Sumber: Hasil Analisis Data

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,094. Artinya adalah variabel independen dalam penelitian ini yaitu *Non Performing Loan* (NPL) dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mampu menjelaskan variabel dependen yakni *ROE DUPONT* sebesar 9,4%. Sedangkan *ROE DUPONT* mampu dijelaskan sebesar 90,6%% oleh variabel independen diluar penelitian ini.

4.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Selain itu, analisis regresi linear berganda juga digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen yang biasanya berupa hubungan positif atau negatif. Hasil analisis regresi linear berganda penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-54,534	44,455		-1,227	,227
1 NPL	-4,009	2,720	-,212	-1,474	,148
BOPO	1,136	,516	,317	2,202	,033

a. Dependent Variable: ROE DUPONT

Sumber: Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.8 dapat disimpulkan persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut

:

$$\text{ROE DUPONT} = -54,534 - 4,009\text{NPL} + 1,136\text{BOPO} + e$$

Hasil analisis regresi linear berganda juga digunakan untuk melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t pada analisis regresi linear berganda. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan hasil Sig. pada analisis regresi linear berganda dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Apabila nilai Sig. < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji hipotesis yang telah dilakukan:

a. Hasil Uji Hipotesis Pertama (H_1)

H₁: Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap ROE DUPONT

Berdasarkan table 4.8 diperoleh nilai Sig. untuk variabel *Non Performing Loan (NPL)* adalah sebesar 0,884. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Sehingga didapatkan bahwa $0,148 > 0,050$ yang berarti bahwa *Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap ROE DUPONT*. Hasil tersebut membuktikan bahwa H_1 ditolak.

b. Hasil Uji Hipotesis Kedua (H_2)

H₂: Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap ROE DUPONT

Berdasarkan table 4.8 diperoleh nilai Sig. untuk variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Sehingga didapatkan bahwa $0,033 < 0,050$ yang berarti bahwa Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) *berpengaruh terhadap ROE DUPONT*. Hasil tersebut membuktikan bahwa H_1 diterima.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* Terhadap ROE DUPONT

Hasil analisis statistik uji t untuk variabel *Non Performing Loan (NPL)* menunjukkan bahwa bahwa *Non Performing Loan (NPL)* tidak berpengaruh terhadap ROE DUPONT sehingga hipotesis pertama yang menyatakan “*Non Performing Loan (NPL)* berpengaruh terhadap ROE DUPONT ditolak”. Hal itu disebabkan nilai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) masih dapat menutupi kredit bermasalah. Laba perbankan masih dapat meningkat dengan NPL yang tinggi karena bank masih dapat memperoleh sumber laba tidak hanya dari bunga tetapi juga dari sumber laba lain, seperti surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan modal bank pada lembaga keuangan yang bukan bentuk bank atau perusahaan lain (*fee based income*) yang juga

memberikan pengaruh yang relatif tinggi terhadap tingkat ROE DUPONT (Sudarno, 2017).

Dalam mengukur kemampuan bank dalam menanggung risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan tidak dilunasi kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur yang digambarkan oleh rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio ini diperoleh dengan membandingkan besarnya kredit bermasalah dengan nilai total kredit yang disalurkan oleh bank. Semakin kecil nilai NPL yang diperoleh suatu bank, maka pengembalian kredit yang diberikan bank kepada nasabah dapat dikatakan baik. Kasmir (2004) bahwa semakin tinggi rasio NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba yang diperoleh bank. Dengan tidak berpengaruhnya NPL dalam menghasilkan laba sebaiknya pihak bank lebih meningkatkan lagi pinjaman karena dari total pinjaman yang meningkat maka bunga pinjaman yang tidak terbayar akibat NPL dapat tertutup oleh kenaikan bunga pinjaman sehingga dapat meningkatkan pendapatan pada bank tersebut. Bank dalam memberikan kredit kepada debitur melakukan analisis terhadap debitur tersebut dengan melakukan peninjauan, penilaian dan yang terpenting adalah pengikatan terhadap agunan sehingga memperkecil resiko gagal bayar. Sehingga agunan tersebut menjadi penjamin apabila terjadi resiko gagal bayar.

Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah yang dialami bank tersebut adalah kecil dan tidak mengalami kesulitan dalam pelunasan. Dinyatakan demikian bahwa dalam pengembalian kredit atau pinjaman oleh nasabah sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dana yang dikembalikan juga menghasilkan keuntungan bagi bank tersebut. Bank tersebut dinyatakan baik dalam perihal pengembalian dana tanpa adanya faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu Nusantara (2009) yang menyatakan bahwa *Non Performing*

Loan (NPL) tidak berpengaruh signifikan terhadap laba untuk kategori bank non go publik, hal tersebut kemungkinan dikarenakan perbankan di Indonesia sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga pembiayaan yang dilakukan bank terhadap resiko atau potensi kredit bermasalah dapat teratasi, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manuaba, (2012) *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap ROE DUPONT.

4.6.2 Pengaruh *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO) Terhadap ROE DUPONT

Hasil analisis statistik uji t untuk variabel *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO) menunjukkan bahwa *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO) berpengaruh terhadap ROE DUPONT, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan “*Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO) berpengaruh terhadap ROE DUPONT diterima”. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai negatif yang ditunjukkan BOPO memperlihatkan bahwa semakin kecil BOPO maka ditunjukkan dengan semakin efisiennya bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Rasio BOPO yang kecil memperlihatkan bahwa biaya operasional bank tersebut lebih kecil daripada pendapatan operasionalnya, maka berdasarkan hal tersebut dapat ditunjukkan dengan sangat efisiennya manajemen bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Tingkat efisiensi bank (BOPO) dalam menjalankan operasinya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan atau earning yang dihasilkan oleh bank. Jika kegiatan operasional dilakukan dengan efisien (dalam hal ini nilai rasio BOPO rendah) maka laba yang dihasilkan bank tersebut akan naik. Selain itu, besarnya rasio BOPO juga disebabkan karena tingginya biaya dana yang dihimpun dan rendahnya pendapatan bunga dari penanaman dana. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan ketika BOPO mengalami kenaikan atau *tren* ke arah positif akan tetapi tidak diikuti dengan kenaikan assetnya atau dapat dikatakan aset perbankan menurun, hal di atas terjadi pada tahun 2016 dimana BOPO Bank Umum di Indonesia mengalami peningkatan sementara di tahun yang sama yang di peroleh justru semakin

menurun ini diindikasikan bahwa modal yang diperoleh dari Dana Pihak Ketiga tidak digunakan secara efektif sehingga tidak menambah laba.

Semakin besar BOPO, maka akan semakin kecil atau menurun kinerja keuangan perbankan, begitu juga sebaliknya, jika BOPO semakin kecil maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan semakin meningkat atau membaik. Dengan kata lain, BOPO berhubungan negatif dengan kinerja bank sehingga juga berpengaruh negatif terhadap ROE DUPONT. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa biaya operasional bank harus lebih kecil dari pendapatan operasional bank sehingga rasio BOPO menjadi lebih kecil dan meningkatkan laba bank ROE DUPONT. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Penelitian Sri Muliawati (2015) *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* berpengaruh positif terhadap *ROE DUPONT*. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nu'man Hamzah Pahlevie (2009) BOPO tidak berpengaruh terhadap *ROE DUPONT*.